

STRATEGI KOMUNIKASI PEMBANGUNAN PEMERINTAH DALAM SOSIALISASI PROGRAM KB : STUDI KASUS KABUPATEN MOJOKERTO

Khoirun Nisa'

Prodi Ilmu Komunikasi, Jurusan Ilmu Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum

Universitas Negeri Surabaya

khoirun.17041184027@mhs.unesa.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi komunikasi pembangunan pemerintah dalam mensosialisasikan program KB, khususnya di Kampung KB (Keluarga Berkualitas) Desa Sumberkarang Kabupaten Mojokerto. Untuk itu, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan metode studi kasus. Metode pengumpulan data dilakukan dengan mewawancarai 12 informan yang terdiri dari pejabat pemerintah, ketua program, rekan sejawat, dan anggota masyarakat, serta mengamati kegiatan sosialisasi. Hasilnya menunjukkan bahwa strategi yang digunakan adalah intervensi kebijakan publik, pengaktifan lembaga sosial, penyebaran informasi dan paparan media. Strategi yang digunakan sangat meyakinkan para pasangan usia subur untuk berpartisipasi aktif dalam keluarga berencana. Hal ini ditunjukkan dengan peningkatan jumlah peserta KB yang signifikan di Desa Sumberkarang. Pembentukan kampung keluarga berkualitas juga berkontribusi terhadap peningkatan ini. Temuan ini berimplikasi pada pendekatan komunikasi holistik dalam mencapai keberhasilan program KB. Penelitian di masa depan tentang pendekatan serupa yang diterapkan di daerah perkotaan perlu diselidiki.

Kata kunci: Keluarga Berencana, Komunikasi Pembangunan, Sosialisasi, Kampung, Masyarakat.

Abstract

The study aimed at investigating government development communication strategies in socializing the family planning program, particularly a high quality family kampung in Sumberkarang village, Mojokerto district. In so doing, the study employed a qualitative approach and a case study method. Data collection methods involved interviewing 12 informants consisting of government officials, head of the program, peers, and community members, as well as observing socialization activities. Results indicate the strategies used including public policy intervention, social institution activation, dissemination and media exposures. The strategies used strongly persuades couples to actively participate in family planning. It is shown by a significant increase in the number of family planning participants in the Sumberkarang village. The establishment of a high quality family kampung also contributes to this surge. The findings has an implication to the holistic communication approach in achieving the success of family planning program. Future research on similar approach implemented in urban areas is worth investigating.

Keywords: family planning, development communication, socialization, kampung, community.

PENDAHULUAN

Pertumbuhan penduduk di Indonesia terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Salah satu wilayah di Indonesia yakni Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Mojokerto pun mengalami peningkatan. Berdasarkan data yang dipublikasikan oleh BPS melalui hasil sensus penduduk tahun 2020, jumlah penduduk di Provinsi Jawa Timur sebesar 40,67 juta jiwa (BPS, 2020b). Sedangkan Kabupaten Mojokerto berdasarkan hasil sensus penduduk pada bulan September 2020, jumlah penduduknya sebanyak 1.119.209 jiwa yang terdiri dari 562.947 laki-laki dan 556.262 perempuan (BPS, 2020a). Namun, untuk laju pertumbuhan penduduknya di Kabupaten Mojokerto mengalami penurunan, yakni pada tahun 2000-2010 tercatat 1,23 % dan pada tahun 2010-2020 menjadi 0,85 % (BPS, 2021).

Sementara itu, ditahun ini tantangan untuk program KB mengalami penurunan. Dikarenakan, pandemi Covid-19 telah membuat berbagai layanan kesehatan penting ditunda atau ditangguhkan oleh pemerintah dan sektor swasta di sebagian besar dunia. Sistem perawatan kesehatan juga berada di bawah tekanan. Meskipun demikian, pelayanan KB terus dilakukan dan tetap melayani masyarakat untuk mencegah komplikasi yang timbul dari kehamilan yang tidak diinginkan (Sharma et al., 2020). Dampak dari adanya pandemi Covid-19 tersebut telah menyebabkan angka drop out (DO) KB di Jawa Timur mengalami kenaikan yang cukup tinggi (Hasanah, 2020). Keadaan tersebut disebabkan kebijakan pemerintah dalam menerapkan pembatasan sosial seperti *physical distancing* dan *social*

distancing. Sehingga berakibat pada menurunnya akseptor KB, karena kurang optimalnya pelayanan KB dan terbatasnya akses untuk mendatangi layanan kesehatan pada masa pandemi. Menurut data di daerah Jawa Timur, pada bulan Februari 2020 angka DO KB tercatat sebanyak 1,13 persen. Selanjutnya, pada bulan Juli mengalami peningkatan menjadi 10,46 persen, atau naik sekitar 1,5 setiap bulan (Hasanah, 2020).

Melihat tingginya angka DO KB yang terus meningkat menandakan bahwa masyarakat yang mengikuti KB mengalami penurunan, dikarenakan masyarakat mengalami ketakutan untuk mendatangi fasilitas kesehatan dimasa pandemi. Sehingga hal ini mengharuskan Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) untuk lebih cepat dalam mengambil keputusan dan mengatur kebijakan. Apabila lambat dalam penanganannya, maka akan berdampak pada ledakan penduduk. Kebijakan tersebut adalah mendorong Organisasi Perangkat Daerah Keluarga Berencana (OPD KB) yang ada di setiap Kabupaten atau Kota untuk lebih mendekati diri dengan mensosialisasikan program KB dan melakukan konseling KB. Karena adanya pelayanan KB bertujuan untuk meningkatkan perencanaan dan jarak kehamilan, serta mencegah kehamilan yang tidak diinginkan. Sehingga melalui tindakan ini individu dapat mencapai jarak kelahiran dan ukuran keluarga yang diinginkan serta berkontribusi pada peningkatan hasil kesehatan untuk anak-anak, wanita, dan keluarga (Sharma et al., 2020).

Agar lebih maksimal dalam penanganan program KB, maka Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional memanfaatkan momen peringatan Hari Keluarga Nasional ke-27 pada tanggal 29 Juni 2020 lalu dengan menyelenggarakan pelayanan serentak sejuta akseptor. Peringatan Hari Keluarga Nasional juga diartikan sebagai momentum untuk mempromosikan bahwa pelayanan KB dimasa pandemi tetap berjalan dengan menerapkan protokol kesehatan (BKKBN, 2020). Seluruh wilayah atau daerah di Indonesia termasuk Kabupaten Mojokerto juga ikut serta dalam kegiatan pelayanan sejuta akseptor KB tersebut. Salah satunya melalui Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan (DP2KBP2) Kabupaten Mojokerto yang ikut berperan dalam mengendalikan pertumbuhan penduduk melalui program KB.

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto memiliki strategi untuk mendekati dan mempengaruhi masyarakat dalam menggunakan KB. Karena dengan adanya strategi yang tepat, maka masyarakat akan tertarik mengikuti dan menggunakan KB, serta mereka tidak akan takut lagi

untuk melakukan pelayanan KB di fasilitas kesehatan. Strategi yang diterapkan menggunakan strategi komunikasi pembangunan, dimana strategi ini dijadikan sebagai langkah atau cara yang dipergunakan untuk membangkitkan maupun mengembangkan keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan. Proses tersebut dilakukan dengan menumbuhkan, menggerakkan, dan memelihara partisipasi masyarakat (Rani, 2016). Partisipasi masyarakat dapat muncul dan berperan didalamnya apabila terdapat interaksi yang baik antara pemerintah dan masyarakat. Adanya interaksi dan keterlibatan dari beberapa elemen-elemen tersebut akan saling mempengaruhi dalam proses pembangunan (Bulamei et al., 2017). Strategi komunikasi pembangunan yang dilakukan kepada masyarakat harus dilakukan dengan pendekatan komunikasi pembangunan, karena dalam komunikasi pembangunan berisikan proses penyebaran pesan-pesan pembangunan yang bertujuan untuk mengubah pendapat, sikap, maupun perilakunya (Effendy, 2006). Selain itu, strategi komunikasi memuat rumusan perencanaan dan manajemen berkomunikasi untuk mencapai sebuah tujuan (Effendy, 2009).

Strategi komunikasi pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Mojokerto diterapkan di lingkup Kampung KB, karena Kampung KB merupakan sebuah program inovatif yang strategis dalam mengatasi permasalahan yang ada di suatu wilayah seperti desa, dusun maupun wilayah-wilayah yang jarang terlihat oleh pemerintah. Permasalahan tersebut menyangkut kependudukan seperti angka kelahiran tinggi, angka kesertaan ber-KB rendah maupun partisipasi masyarakat didesa yang rendah. Maka dari itu, penerapan strategi komunikasi pembangunan dilakukan di Kampung KB, agar permasalahan yang muncul pada wilayah tersebut dapat diminimalisir dan masyarakat mendapatkan kesejahteraan serta memiliki kualitas hidup yang lebih baik.

Kabupaten Mojokerto memiliki Kampung KB yang berjumlah 38 kampung dari 18 kecamatan. Keseluruhan Kampung KB tersebut telah mendapatkan perhatian dan pembinaan yang baik melalui strategi yang diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto. Namun, dari keseluruhan Kampung KB, ada salah satu Kampung KB yang menjadi percontohan dan prioritas utama yakni Kampung KB “Sejahtera” Desa Sumberkarang, Kecamatan Dlanggu. Penerapan strategi komunikasi pembangunan di Kampung KB “Sejahtera” berbeda dengan Kampung KB lain. Kampung KB percontohan akan lebih diutamakan dalam pembinaan dibanding wilayah lain, seperti dalam hal kesertaan ber-KB. Kesertaan ber-KB di Kampung KB percontohan menjadi indikator yang diperhatikan

oleh pemerintah, agar masyarakat dapat aktif melakukan pelayanan ber-KB. Karena sebelumnya masyarakat di Kampung KB “Sejahtera” partisipasinya dalam ber-KB paling rendah dibandingkan desa lain. Oleh karena itu, di Desa Sumberkarang pembinaanya lebih diutamakan dan diprioritaskan. Agar angka kesertaan KB di Kampung KB “Sejahtera” dapat meningkat tinggi, dan hal ini dapat menjadi contoh bagi Kampung KB lain untuk mencontohnya dan meningkatkan angka kesertaan ber-KB di wilayahnya.

Oleh karena itu penelitian ini mengkaji tentang strategi komunikasi pembangunan Pemerintah Kabupaten Mojokerto dalam meningkatkan angka kesertaan ber-KB masyarakat Desa Sumberkarang melalui sosialisasi program KB di Kampung KB. Strategi ini dilakukan agar dapat mengubah perilaku masyarakat secara konsisten di lingkup Kampung KB, meskipun dalam kondisi Covid-19.

METODE

Pendekatan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan metode studi kasus. Teknik pengumpulan datanya melalui wawancara semi terstruktur dengan 12 informan yang terdiri dari pejabat pemerintah, ketua program, rekan sejawat, dan anggota masyarakat, serta mengamati kegiatan sosialisasi. Pertanyaan-pertanyaan dalam penelitian tersebut menanyakan terkait strategi yang digunakan pemerintah dalam program KB, keterlibatan masyarakat dalam program KB, dan tanggapan masyarakat terhadap sosialisasi yang diberikan oleh pihak Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP). Hasil wawancara diperiksa melalui triangulasi teknik dan dianalisis menggunakan teknik analisis data berupa reduksi, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

Kampung KB “Sejahtera” terletak di Desa Sumberkarang, Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto. Desa Sumberkarang sendiri merupakan salah satu dari 16 Desa yang terletak di wilayah Kecamatan Dlanggu, Kabupaten Mojokerto. Desa Sumberkarang terdiri dari 5 dusun yakni Dusun Sumbersari, Dusun Karangnongko, Dusun Karangkletak, Dusun Ketapang dan Dusun Kertorejo. Secara administratif Desa Sumberkarang terbagi menjadi 19 RT dan 6 RW.

Jumlah penduduk Desa Sumberkarang terdiri dari 3.124 jiwa dengan jumlah KK sebanyak 1.004 kepala keluarga. Jika dilihat dari jenis kelamin,

maka jumlah penduduk laki-laki sebesar 1.548 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebesar 1.576 jiwa. Temuan dalam penelitian ini menggambarkan adanya perubahan perilaku masyarakat Desa Sumberkarang dalam menggunakan KB. Dalam hal ini terjadi peningkatan mengenai partisipasi masyarakat dalam ber-KB. Perubahan perilaku ini dipengaruhi adanya strategi komunikasi pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Mojokerto.

Komunikasi pembangunan menjadi salah satu cara efektif dalam mendekati masyarakat, dengan tujuan menumbuhkan kesadaran dan menggerakkan partisipasi mereka dalam proses perubahan. Namun, untuk mendekati maupun menggerakkan masyarakat agar dapat mengikuti tujuan yang telah ditetapkan, diperlukan sebuah strategi yang sesuai dan tepat. Berikut strategi yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto yakni melalui DP2KBP2 Kabupaten Mojokerto, diantaranya adalah intervensi kebijakan publik, aktivasi lembaga sosial pengaktifan lembaga sosial, penyebaran informasi dan paparan media.

Intervensi kebijakan publik merupakan strategi yang dilakukan melalui pendekatan dengan para pengambil keputusan, baik itu anggota dewan, maupun pada sektor-sektor terkait. Biasanya dilakukan dengan mengadakan pertemuan-pertemuan khusus di awal tahun maupun di akhir tahun. Pendekatan ini dilakukan untuk mempengaruhi para pemegang keputusan maupun sektor terkait untuk lebih memberikan prioritas utama pada pembangunan dan memaksimalkan banyak kegiatan untuk kampung keluarga berkualitas di Desa Sumberkarang. Hal ini diungkapkan oleh Bapak MLN selaku pendamping di Kampung Keluarga Berkualitas, Desa Sumberkarang, berikut ini :

“ Kita melakukan intervensi dengan Organisasi Perangkat Daerah Keluarga Berencana (OPD KB) maupun dinas lintas sektor yang ada di kecamatan. Intervensi tersebut dilakukan untuk mendapatkan prioritas buat Desa Sumberkarang. Karena Desa Sumberkarang menjadi percontohan dalam kampung keluarga berkualitas di Jawa Timur. Makanya kita menjalin kerjasama dengan lintas sektor agar bisa memaksimalkan banyak kegiatan di Desa Sumberkarang. Selain itu juga untuk masalah pembangunan, kita melakukan intervensi kepada Organisasi Perangkat Daerah Keluarga Berencana (OPD KB) agar bisa melakukan pendekatan kepada dinas-dinas yang lain agar proyek pembangunannya bisa di lakukan di desa Sumberkarang. Seperti kemarin itu, ada bantuan keuangan desa untuk pembangunan

pendopo dan pembangunan rumah data Kampung KB. "(MLN-W10-PKKB-01-07-2021)

Pengaktifan lembaga sosial merupakan strategi yang dilakukan dengan melibatkan masyarakat yang tergabung dalam kelompok IMP (Institusi Masyarakat Pedesaan) yakni terdiri dari, PPKBD (Pembantu Penyuluh Keluarga Berencana Desa) dan Sub PPKBD. Pengaktifan peranan dari IMP ini akan memudahkan pemerintah dan masyarakat dalam mendukung program KB, khususnya untuk meningkatkan jumlah akseptor KB. IMP ini merupakan masyarakat yang dipilih dan diberikan tanggungjawab langsung oleh pemerintah dalam menyukseskan program-program pembangunan di desa, termasuk dalam program KB. Keterlibatan IMP di desa dilakukan dengan cara menggerakkan dan mengajak masyarakat untuk ikut serta dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Selain itu, IMP juga bertugas dalam menyampaikan informasi dan mengedukasi masyarakat untuk mendukung program keluarga berencana. Sehingga pemerintah hanya sebatas memberikan pendampingan, selebihnya menjadi wewenang IMP dalam bertugas di desa. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu SH selaku kepala Petugas Lapangan Keluarga Berencana di Kecamatan Dlanggu, berikut ini :

"Sebenarnya yang melakukan penyuluhan ke masyarakat itu bukan Petugas Lapangan Keluarga Berencana atau pemerintah. Tugas Petugas Lapangan Keluarga Berencana dan pemerintah disini itu hanya memberikan pendampingan dan pembinaan terkait kegiatan KB. Tapi yang bergerak dan memberikan penyuluhan langsung ke masyarakat itu adalah kelompok IMP (Institusi Masyarakat Pedesaan). Petugas Lapangan Keluarga Berencana hanya memberikan informasi terkait KB kepada kelompok IMP, kemudian informasi tersebut akan diteruskan oleh kelompok IMP ke masyarakat yang ada di Kampung Keluarga berkualitas."(SH-W11-KPLKB-01-07-2021)

Penyebaran informasi dan paparan media merupakan strategi yang dilakukan dengan menyebarkan informasi melalui penyuluhan atau sosialisasi dan melalui media cetak serta online. Penyuluhan atau sosialisasi dilakukan melalui komunikasi formal maupun komunikasi informal. Komunikasi formal merupakan komunikasi yang didasarkan pada sistem atau hierarki dari organisasi. Artinya pola komunikasinya harus berjalan sesuai strukturnya.

Komunikasi formal ini berkaitan dengan organisasi kemasyarakatan maupun pada kelompok kegiatan. Pada organisasi kemasyarakatan, para IMP sering memanfaatkan kegiatan didalamnya untuk mensosialisasikan atau mengajak masyarakat supaya mau ber-KB. Karena pada kesempatan itu, sebagian besar masyarakat Desa Sumberkarang akan berkumpul dan bertemu langsung untuk mengikuti acara tersebut. Sehingga, apabila IMP menyampaikan informasi dapat langsung didengar dan diterima oleh masyarakat Desa Sumberkarang.

Kegiatan dalam organisasi kemasyarakatan tersebut menyangkut kegiatan keagamaan maupun kegiatan PKK. Tujuan dilakukannya sosialisasi pada kegiatan tersebut adalah menggencarkan terus edukasi maupun penyampaian informasi agar masyarakat terbiasa dan memahami pentingnya KB. Sehingga mereka mau memutuskan untuk mengikuti kesertaan ber-KB. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu SM selaku Sub PPKBD (Pembantu Penyuluh Keluarga Berencana Desa) berikut ini :

"Biasanya penyuluhannya dilakukan pas diacara tahlilan, posyandu atau kadang-kadang mendatangi rumah-rumah penyuluhannya biar mendapat akseptor."(SM-W6-IMP-22-06-2021)

Sedangkan, pada kelompok kegiatan (poktan), pihak IMP memanfaatkan pertemuan langsung dengan masyarakat melalui kegiatan-kegiatan kelompok, seperti pada kelompok Bina Keluarga Balita (BKL), Bina Keluarga Remaja (BKR) ,Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R).

Kelompok kegiatan ini merupakan wadah yang efektif untuk memberdayakan masyarakat agar lebih produktif, sekaligus sebagai tempat memperoleh pengetahuan baru. Kelima kelompok kegiatan tersebut memiliki strategi yang berbeda dalam mengkomunikasikan program-program pembangunan di masyarakat. Strategi tersebut ditempuh dengan tujuan mengarahkan masyarakat pada upaya merubah sikap, perilaku maupun *mindset* berpikrinya kearah yang lebih baik dan rasional.

Sedangkan untuk komunikasi informal merupakan penyuluhan atau penyebaran informasi yang dilakukan tanpa merujuk pada struktur organisasi. Artinya dapat dilakukan kapan saja secara bebas sesuai dengan kondisi yang ada tanpa memperdulikan struktur yang berlaku dalam sebuah organisasi. Karena sifat dari komunikasi informal ini tidak terikat, maka IMP juga memanfaatkannya untuk mendekati dan memengaruhi masyarakat melalui sosialisasi. Bentuk kegiatan komunikasi yang

dilakukan pun beragam, yakni terdiri dari kunjungan rumah dan pendampingan akseptor KB.

Kunjungan rumah merupakan kegiatan sosialisasi yang dilakukan IMP kepada masyarakat Desa Sumberkarang dengan cara mengunjungi rumahnya masing-masing secara langsung. Kegiatannya pun dilakukan kapanpun dan semakin sering kegiatan ini dilakukan maka hasilnya pun akan semakin baik. Hal ini dilakukan sebagai sebuah strategi untuk mendapatkan akseptor KB. Oleh karenanya, IMP harus mendekati dan memengaruhi masyarakat secara pribadi melalui kunjungan rumah. Agar ajakan untuk ber-KB dapat mudah di ikuti oleh masyarakat Desa Sumberkarang.

Selain itu, kunjungan rumah juga dijadikan sebagai cara untuk menyampaikan informasi komunikasi pembangunan mengenai KB kepada masyarakat. Strategi tersebut digunakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat yang sebelumnya tidak pernah mengikuti kegiatan di desa seperti di organisasi kemasyarakatan maupun di kelompok kegiatan. Tujuannya, IMP ini ingin masyarakat mengetahui dan memahami tentang KB dan berbagai jenis penggunaan KB, walaupun mereka tidak mengikuti kegiatan yang diselenggarakan. Sehingga melalui kunjungan rumah ini IMP memaksimalkan sosialisasi dan edukasi terkait KB dengan mendatangi setiap rumah masyarakat yang menjadi sasaran.

Sedangkan untuk pendampingan akseptor ini merupakan kegiatan yang dilakukan oleh IMP untuk mendampingi akseptor KB dalam melakukan pelayanan KB, baik di puskesmas, rumah sakit maupun di Bidan Praktik Mandiri (BPM). Pendampingan dilakukan dari mulai mengantar, membantu menyelesaikan administrasi, mendampingi saat proses pemasangan alat kontrasepsi sampai mengantar pulang kembali. Pada kegiatan ini IMP menjemput bola dengan membantu masyarakat secara langsung, agar masyarakat mau untuk ikut KB. Karena IMP memahami bahwa sebagian besar masyarakat ingin ber-KB, namun untuk melakukan pelayanan merasa kesulitan. Sehingga, hal tersebut dimanfaatkan oleh IMP untuk mendampingi dan membantu masyarakat secara penuh, dengan tujuan untuk meningkatkan jumlah akseptor KB di Desa Sumberkarang.

Strategi yang dilakukan IMP tersebut merupakan bagian dari komunikasi pembangunan yakni menumbuhkan kesadaran masyarakat dengan menawarkan bantuan disegala situasi yang tujuannya mengajak masyarakat ber-KB. Setidaknya dengan strategi tersebut masyarakat akan lebih memahami dan percaya bahwa IMP memang menjalankan tanggungjawabnya untuk memastikan seluruh masyarakat dapat mengikuti KB.

Dalam mendampingi masyarakat melakukan pelayanan, IMP tetap memaksimalkan tanggungjawabnya untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat yang bersangkutan. Hal ini dilakukan agar masyarakat dapat terus aktif menggunakan KB dan tidak memilih untuk putus KB atau drop out KB.

Sedangkan untuk pemaparan media ini dilakukan melalui media cetak maupun online. Jika dilakukan melalui media cetak seperti leaflet, brosur, sedangkan melalui media online biasanya akan dipublikasikan melalui berita online seperti radar jawapos Mojokerto, dan harianbhirawa dan jika melalui media sosial akan dipublikasikan melalui instagram pihak DP2KBP2 Kabupaten Mojokerto dan facebook penyuluh KB Kecamatan Dlanggu. Karena edukasi dan informasi yang diberikan kepada masyarakat mengenai program KB tidak hanya dilakukan melalui tatap muka atau pertemuan rutin. Namun, dapat juga dilakukan melalui media informasi seperti media cetak maupun online. Strategi ini cukup efektif dalam memengaruhi masyarakat, karena masyarakat dapat menerima informasi walaupun tidak mengikuti kegiatan. Sehingga, informasi maupun edukasi yang disampaikan oleh IMP dapat tetap di terima dan di ikuti.

Sosialisasi program KB yang dipublikasikan melalui media informasi tersebut merupakan bentuk kegiatan memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai suatu informasi yang berkaitan dengan program KB. Sosialisasi tersebut penting untuk disampaikan karena untuk membentuk kesadaran masyarakat agar mau mengikuti kesertaan ber-KB, yang bertujuan menciptakan keluarga yang ideal dan berkualitas. Namun, untuk mencapai kesertaan ber-KB yang tinggi pada masyarakat, sosialisasi diberbagai media pun harus lebih digencarkan. Karena, pengaruh dari media-media informasi tersebut sangat cepat mempengaruhi pola pikir masyarakat. Sehingga, melalui penyebaran informasi diharapkan semakin banyak masyarakat Desa Sumberkarang yang terpengaruh dan terlibat untuk menggunakan KB.

Strategi penyuluhan yang dilakukan melalui cara-cara diatas merupakan bentuk penyebaran informasi kepada masyarakat untuk memberikan kesadaran dan menggerakkan masyarakat dalam menyukseskan program keluarga berencana di Desa Sumberkarang. Seperti halnya penuturan Ibu SUV selaku Kepala Bidang Penyuluhan dan Penggerakan di Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kabupaten Mojokerto adalah sebagai berikut :

“ Penyuluhan yang sudah kita lakukan itu dari Dana Bantuan Operasional Keluarga

Berencana (BOKB) adalah melalui pengadaan leaflet, brosur, kemudian ada siaran-siaran radio. Selain itu juga memanfaatkan sosial media instagram dan facebook.” (SUV-W12-KPP-13-08-2021)

Dari ketiga strategi komunikasi yang dijalankan tersebut, tujuannya adalah untuk meningkatkan angka kesertaan KB masyarakat dan membentuk kesadaran masyarakat untuk mau aktif menggunakan KB. Oleh karenanya dari adanya kegiatan tersebut menjadikan peserta KB di Desa Sumberkarang menjadi meningkat dari awal tahun 2018 sampai 2021 bulan Mei, hal tersebut tergambarkan dalam tabel berikut ini :

Tabel 1. Peserta KB Desa Sumberkarang Tahun 2018-2021 (Mei)

No	TAHUN	PUS Yang Adanya	PUS Yang Ikut KB				PUS Yang Tidak Ikut KB					
			Pemerintah	SwaSta	Jumlah	%	HML	IAS	IAT	TIA	Jumlah	%
1	2018	736	254	330	584	79,35	24	59	27	42	152	20,65
2	2019	753	253	339	592	78,62	22	70	27	42	161	21,38
3	2020	758	266	338	604	79,68	23	68	29	34	154	20,31
4	2021 (Mei)	762	267	345	612	80,31	23	64	29	34	150	19,68

(Sumber : Dokumen Balai Penyuluh KB Kecamatan Dlanggu)

Berdasarkan tabel diatas, angka peserta KB mengalami peningkatan dari awal pencanangan Kampung Keluarga Berkualitas sampai tahun berikutnya. Dari adanya pencanangan Kampung KB “Sejahtera” tersebut telah memberikan dampak yang baik bagi program KB yakni dengan meningkatnya jumlah akseptor KB. Pada tahun 2018 sejak pencanangan Kampung KB “Sejahtera” jumlah akseptor KB rendah yakni hanya 79,35 % atau 584 PUS (Pasangan Usia Subur) yang mengikuti KB dari 736 PUS.

Sedangkan ditahun-tahun berikutnya jumlah PUS yang mengikuti KB pun semakin meningkat dan PUS yang tidak mengikuti KB semakin berkurang. Walaupun demikian, ditahun 2019 PUS yang tidak ikut KB sempat mengalami peningkatan menjadi 21,38%, namun ditahun 2021 (Mei) mengalami penurunan menjadi 19,68%. PUS yang tidak ikut KB ini merupakan masyarakat yang sedang hamil, Ingin Anak Segera (IAS), Ingin Anak Ditunda (IAT), dan Tidak Ingin Anak Lagi (TIA). Pencapaian kesertaan ber-KB yang terus meningkat ini tentu tidak terlepas dari peranan Petugas Penyuluh KB dan para IMP

yang terus memberikan pelayanan terbaik agar masyarakat dapat meningkatkan kesehatannya.

Peningkatan tersebut tidak terlepas dari peranan Institusi Masyarakat Pedesaan dalam memberikan informasi dan mengajak masyarakat dalam ber-KB. Sehingga terjadi perubahan perilaku masyarakat dalam menggunakan KB. Berikut pengalaman Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) Desa Sumberkarang dalam menyosialisasikan program KB ke masyarakat.

Informan pertama yakni Ibu SL, membahas bahwa pada saat mensosialisasikan program KB harus dilakukan secara berulang dan terus menerus, agar masyarakat yang awalnya menolak menjadi bersedia.

“Iya kita bertugas mencari akseptor sebanyak-banyaknya. Makanya kalau ada masyarakat yang menolak kita juga datangi ke rumahnya. Kalau tetap menolak, kadang awalnya dibiarkan dulu, terus nanti didatangi lagi, sewaktu-waktu dikunjungi lagi. Iya namanya dibujuk biar ikut KB mbak, dideketin terus biar tergerak untuk ikut KB.” (SL-W5-IMP-22-06-2021)

Informan kedua Ibu SM, membahas bahwa apabila masyarakat tetap menolak dan tidak bersedia menggunakan KB, para Institusi Masyarakat Pedesaan meminta bantuan kepada pihak Penyuluh KB untuk memberikan pendekatan kepada masyarakat yang bersangkutan.

“Iya pelan-pelan saya dekati terus dan saya beri penyuluhan yang sering. Terkadang kalau ada yang tetap menolak menggunakan KB, saya tetap dekati pelan-pelan dan mendatangi ibu kepala dusun, atau penyuluh KB yang ada di Kecamatan untuk datang ke rumahnya.” (SM-W6-IMP-22-06-2021)

Sementara itu, di lain sisi masyarakat juga mendeskripsikan terkait pengalamannya mengikuti program KB yang ada di Kampung KB “Sejahtera”. Pengalaman tersebut menggambarkan tentang tanggapan masyarakat dalam menerima informasi sosialisasi ber-KB sampai pada perubahan perilaku untuk bersedia mengikuti KB.

Informan ketiga Ibu SW, membahas bahwa sebelumnya menolak menggunakan KB walaupun pihak Institusi Masyarakat Pedesaan sudah memberikan informasi bahwa sampai mendatangi rumahnya. Namun, pada akhirnya bersedia mengikuti KB.

“Saya dulu sangat menolak sekali, karena pada awalnya saya itu ber-KB karena takut gemuk, kemudian takut kalau ASI itu nanti

terkontaminasi sama KB. Kalau menurut saya dulu anaknya nanti jadinya tidak sehat, jadi ya tidak ber-KB. Setelah itu saya pikir lagi, kalau tidak ber-KB pasti nanti saya akan hamil lagi. Akhirnya saya memutuskan untuk ikut dan milih steril daripada saya hamil terus.” (SW-W9-M-25-06-2021)

Informan keempat Ibu WA, membahas bahwa sebelumnya sudah menggunakan KB, namun tetap diarahkan oleh Institusi Masyarakat Pedesaan untuk menggunakan KB MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang). KB MKJP adalah metode yang paling efektif dalam mencegah kehamilan. Efektifitas dari pemakaian KB MKJP dapat bertahan selama 3 tahun bahkan seumur hidup.

“ Sudah 9 tahun saya menggunakan KB mbak. Pernah KB suntik, pil, spiral, dan sekarang langsung steril, yang belum pernah itu implant. Pada saat saya ikut yang steril di desa itu sebelumnya dikasih informasi sama Institusi Masyarakat Pedesaannya mbak, makanya saya ikut. Karena biasanya dikasih tahu sama Institusi Masyarakat Pedesaannya kalau mau ada penyuluhan, atau pelayanan KB di desa.” (WA-W1-M-20-06-2021)

Berdasarkan pengalaman yang ditunjukkan oleh para informan tersebut menunjukkan bahwa peningkatan angka kesertaan ber-KB masyarakat Desa Sumberkarang dipengaruhi oleh adanya strategi komunikasi yang baik dan tepat yang dijalankan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto. Sehingga hasilnya dapat tergambarkan seperti pada tabel 1. Karena terlihat dari awal penancangan Kampung KB di Desa Sumberkarang tahu 2018, jumlah peserta KBnya hanya 584 atau 79,35 % dan ditahun 2021 sampai bulan Mei mengalami peningkatan menjadi 612 atau 80,31%.

B. PEMBAHASAN

Kesuksesan program KB yang dilakukan di Kampung KB “Sejahtera” Desa Sumberkarang tidak lepas dari strategi yang telah diterapkan oleh pihak pemerintah Kabupaten Mojokerto yakni melalui DP2KBP2 Kabupaten Mojokerto. Pihak DP2KBP2 memaksimalkan strateginya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat Desa Sumberkarang yang rendah dalam hal menggunakan KB. Strategi komunikasi pembangunan tersebut dilakukan melalui 3 strategi yakni intervensi kebijakan publik, aktivasi lembaga sosial pengaktifan lembaga sosial, penyebaran informasi dan paparan media.

Jika dikaitkan dalam teori penelitian strategi komunikasi menurut Hafied Cangara, strategi yang ditempuh memuat 5 tahapan, yakni terdiri dari penelitian, perencanaan, pelaksanaan atau implementasi, evaluasi dan pelaporan (Cangara, 2013). Sedangkan pihak pemerintah yakni DP2KBP2 Kabupaten Mojokerto menggunakan 3 strategi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menggunakan KB. Ketiga strategi yang digunakan tersebut sangat relevan dalam memengaruhi masyarakat untuk mengubah perilakunya agar mau ber-KB. Hal ini dibuktikan dengan adanya peningkatan yang signifikan pada angka peserta KB masyarakat di Kampung KB “Sejahtera” Desa Sumberkarang. Selain itu juga dipengaruhi adanya pembentukan Kampung KB. Dimana keberadaannya telah membuat masyarakat menjadi lebih sadar dan mau untuk mengikuti KB. Karena, semenjak berdirinya Kampung KB di Desa Sumberkarang, masyarakat lebih diperhatikan dan mendapat pembinaan langsung dari pemerintah setempat.

Lima tahapan dalam strategi komunikasi yang diterapkan dalam teori Hafied Cangara (2013) merupakan tahapan semestinya yang menjadi pedoman dalam mencapai sebuah tujuan, artinya yang menyangkut tindakan teknis sebelum turun langsung. Namun, pada saat di lapangan, tahapan tersebut tidak semuanya relevan dan dapat digunakan, karena strategi yang digunakan harus disesuaikan dengan kondisi lapangan. Artinya langsung bersentuhan dan dipraktekkan secara langsung pada masyarakat. Hal ini dilakukan agar apa yang menjadi tujuan pemerintah dengan masyarakat dapat sesuai.

Penerapan strategi tersebut juga sejalan dengan penelitian Bulamei, Koagouw dan Runtuwene (2017) bahwasannya dalam melakukan komunikasi pembangunan diperlukan keterlibatan dari masyarakat untuk ikut berpartisipasi didalamnya. Keterlibatan tersebut akan menumbuhkan partisipasi masyarakat untuk lebih aktif, mandiri dan bertanggungjawab dalam peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan (Bulamei et al., 2017). Keterlibatan dan partisipasi masyarakat itulah yang nantinya akan menentukan suksesnya sebuah program. Seperti halnya pada penelitian peneliti, partisipasi masyarakat Desa Sumberkarang dalam program KB awalnya rendah dibandingkan dengan desa lain, namun kini telah mengalami perubahan dan peningkatan disetiap tahunnya. Hal tersebut tidak terlepas dari adanya keterlibatan masyarakat yakni dengan memberikan tanggungjawab pada IMP (Institusi Masyarakat Pedesaan) yang terdiri dari PPKBD dan Sub PPKBD.

Keterlibatan IMP ini berbeda dengan keterlibatan masyarakat pada umumnya. Karena IMP

ini merupakan masyarakat yang dikhususkan untuk dilibatkan dan diberikan tanggungjawab lebih untuk mengendalikan program pembangunan di desa. Oleh karenanya, pihak DP2KBP2 Kabupaten Mojokerto mempercayakan mengenai segala bentuk kegiatan untuk dilakukan oleh IMP. Karena IMP ini sebagai tangan panjang pemerintah dalam memberikan edukasi ke masyarakat, selain itu mereka juga harus memenuhi target dan capaian untuk mencari akseptor KB agar partisipasi masyarakat dalam menggunakan KB tidak turun. Di lain sisi mereka juga diberikan insentif dalam memaksimalkan perannya di lapangan untuk mendukung program KB. Tanggungjawab dan keterlibatan IMP itulah yang menentukan sukses tidaknya program KB di desa. Karena semua bergantung pada peranan IMP yang selalu mengencangkan sosialisasi mengenai KB, agar masyarakat dapat meningkatkan partisipasi ber-KBnya. Sehingga wajar, apabila partisipasi masyarakat Desa Sumberkarang meningkat, karena ada IMP sebagai pihak yang mengendalikan program pembangunan di masyarakat.

Di dukung juga dengan penelitian Ginanjar Prakoso Utomo (2011), bahwa dalam penelitiannya membahas ada 2 aspek dalam melakukan strategi komunikasi pembangunan pada renovasi Pasar Gading. Aspek tersebut meliputi aspek pendekatan dan sumber daya. Dimana dalam melakukan strategi harus paham sasaran yang akan dituju, sasaran tersebut harus dibagi menjadi beberapa kelompok untuk melancarkan proses komunikasi pembangunan di masyarakat. Selain itu, aspek sumber daya ini meliputi sumber daya uang dan manusia, artinya dalam program pembangunan juga diperlukan dana untuk melancarkan program-program yang direncanakan, dan sumber daya manusia sebagai pihak yang terlibat dalam proses pembangunan (Utomo, 2011). Pada penelitian peneliti kedua aspek tersebut ikut berpengaruh dalam mendukung kesuksesan program KB. Karena untuk mengajak masyarakat, diperlukan pendekatan yang baik dengan mengenali setiap sasaran. Sedangkan aspek sumber daya, yakni sumber daya yang diperlukan untuk melancarkan program-program pembangunan melalui beberapa media informasi dan sumber daya manusia diperlukan untuk menyukseskan program dengan partisipasi keikutsertaannya.

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan diatas, maka dapat di simpulkan bahwa strategi yang digunakan oleh DP2KBP2 Kabupaten Mojokerto dalam mendukung program KB adalah melakukan advokasi, penyuluhan dan KIE, serta pembinaan IMP. Dalam

strategi yang pertama yakni intervensi kebijakan publik, dilakukan dengan cara pendekatan yang bersama para pengambil keputusan, baik itu anggota dewan, maupun pada sektor-sektor terkait. Sedangkan strategi yang kedua yakni pengaktifan lembaga sosial yang dilakukan dengan melibatkan masyarakat yang tergabung dalam IMP (Institusi Masyarakat Pedesaan) yang terdiri dari PPKBD (Pembantu Penyuluh Keluarga Berencana Desa) dan Sub PPKBD. Pengaktifan lembaga sosial ini dilakukan dengan melibatkan masyarakat untuk ikut berperan dan mendukung pemerintah dengan cara menggerakkan dan mengajak masyarakat lainnya untuk ikut serta dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Dan, strategi ketiga yakni penyebaran informasi dan paparan media. Penyebaran informasi dan paparan media ini dilakukan dengan memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait tentang pemahaman akan pentingnya menggunakan KB bagi perencanaan keluarga. Penyuluhan ini dilakukan melalui pertemuan langsung maupun publikasi media. Jika melalui pertemuan langsung, biasanya dilakukan melalui kegiatan keagamaan, posyandu, dan rapat-rapat rutin. Sedangkan jika melalui publikasi media, biasanya dilakukan melalui sosial media (*instagram* dan *facebook*), siaran-siaran radio, maupun pemberian *leaflet* dan brosur.

B. Saran

Saran yang dapat diberikan kepada pihak-pihak terkait atas penelitian yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah DP2KBP2 Kabupaten Mojokerto

Diharapkan adanya koordinasi dengan para PLKB terkait sinkronisasi program maupun tindak lanjut program yang ada di lapangan. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan pengarahan yang jelas mengenai kegiatan yang sudah dibina dan sudah berprogres kedepannya. Agar kegiatan yang sudah dibina mendapatkan tindakan selanjutnya, tidak berhenti sampai ditahap tersebut. Koordinasi yang demikian dilakukan untuk menghindari miskomunikasi dan kesalahpahaman antara pihak DP2KBP2 dengan para PLKB di lapangan.

2. Bagi Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB)

Diharapkan mampu menyiapkan data informasi yang lengkap dan terbaru di rumah data kependudukan Kampung KB dan memaksimalkan koordinasi dengan lintas sektor

yang ada untuk bersama-sama membangun di Kampung KB.

3. Bagi Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)

Diharapkan dapat terus gencar menyosialisasikan program KB kepada masyarakat, walaupun banyak masyarakat yang menolak bahkan tidak percaya namun tetap harus menyelesaikan program KB di Kampung KB “Sejahtera”. Karena dengan terus menyampaikan informasi KB, lama kelamaan masyarakat akan mudah terpengaruh dan bersedia ikut KB.

4. Bagi Masyarakat Desa Sumberkarang

Diharapkan masyarakat yang menolak bahkan belum ber-KB untuk mulai menggunakan KB agar dapat merencanakan keluarga yang sejahtera dan berkualitas. Sedangkan bagi yang sudah ber-KB namun KB yang digunakan adalah non MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang), sebaiknya dapat berpindah ke KB MKJP. Karena KB MKJP paling efektif dalam mencegah kehamilan. Efektifitas dari pemakaian KB MKJP dapat bertahan selama 3 tahun bahkan seumur hidup.

DAFTAR PUSTAKA

- BKKBN. (2020). Muri Untuk Pelayanan KB Sejuta Akseptor Serentak Di Seluruh Indonesia. *Bkkbn.Go.Id*.
<https://www.bkkbn.go.id/detailpost/muri-untuk-pelayanan-kb-sejuta-akseptor-serentak-di-seluruh-indonesia>
- BPS. (2020a). *Berita Resmi Statistik: Hasil Sensus Penduduk 2020*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Mojokerto.

- BPS. (2020b). *Hasil Sensus Penduduk 2020*. <https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/01/21/1854/hasil-sensus-penduduk-2020.html>
- BPS. (2021). *Provinsi Jawa Timur Dalam Angka Jawa Timur Province In Figures 2021*. BPS Provinsi Jawa Timur.
- Bulamei, E. C., Koagouw, F. V. I. ., & Runtuwene, A. (2017). Kajian Komunikasi Pembangunan Dinas Pekerjaan Umum Dalam Meningkatkan Perbaikan Infrastruktur Kota Manado. *Acta Diurna*, 6.
- Cangara, H. (2013). *Perencanaan dan Strategi Komunikasi*. PT Raja Grafindo Persada.
- Effendy, O. U. (2006). *Ilmu Komunikasi: Teori dan Praktek*. Remaja Rosdakarya.
- Effendy, O. U. (2009). *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*. PT Remaja Rosdakarya.
- Hasanah, A. (2020). Pandemi Covid, Peserta KB di Jatim Turun. *Rri.Co.Id*.
<https://rri.co.id/daerah/902832/pandemi-covid-peserta-kb-di-jatim-turun>
- Rani, S. (2016). Strategi Komunikasi dalam Pembangunan Desa Berbasis Partisipatif. *Ilmu Dakwah*, 15.
- Sharma, K. A., Zangmo, R., Kumari, A., Roy, K. K., & Bharti, J. (2020). Taiwanese Journal of Obstetrics & Gynecology Family planning and abortion services in COVID 19 pandemic. *Taiwanese Journal of Obstetrics & Gynecology*, 59(6), 808–811.
<https://doi.org/10.1016/j.tjog.2020.09.005>
- Utomo, G. P. (2011). *Strategi Komunikasi Pembangunan Pemkot Surakarta dalam Penataan Ruang Publik (Analisis Diskriptif Kualitatif Pada Pra Dan Pasca Relokasi Pasar Gading)*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.